



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

PERUBAHAN RENCANA KERJA *Tahun* 2025

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin**

✉ disnakertransmuba@gmail.com

🌐 www.disnakertrans.mubakab.go.id

📍 JL Kolonel Wahid Udin Lk2 No.5, Serasan Jaya, Kec. Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711



KATA PENGANTAR

Sebagai Penjabaran Rencana Strategis (RENTRA), Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai acuan kerja dalam satu tahun kedepan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan guna mendukung tujuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja ini sangat ditentukan oleh Kinerja dari seluruh Staf dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan peran masing-masing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.



Sekayu, 23 Juni 2025

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin**

H. MURSALIN, SE, MM
NIP 197003312000031001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 SK Tim Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025	iv
SK Penetapan Perubahan Renja Tahun 2025	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Permasalahan dan Hambatan	32
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II	36
2.6. Isu-Isu Penting/ Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	45
2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	47
2.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rencana Program dan Kegiatan	45
 BAB V PENUTUP	
4.1. Catatan Penting yang mendapat Perhatian	51
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	52
4.3. Rencana Tindak Lanjut	53



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk II Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu
Telp. 0714-321322 Facs. 0714-321961 Sekayu Kode Pos. 30711
Website : disnakermuba.go.id. E-Mail:disnakertransmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 160 /KPTS/NAKERTRANS/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2025.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kinerja tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 296);
13. Peraturan Bupati Musi Bayuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/205/KPTS/I/Disnakertrans/2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU :** Memberlakukan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

- KEDUA : Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2023-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD, program prioritas nasional dan provinsi.
- KETIGA : Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 berpedoman pada Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 23 Juni 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197003312000031001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk II Kelurahan Serasan Jaya Kec. Sekayu
Telp. 0714-321322 Facs. 0714-321961 Sekayu Kode Pos. 30711
Website : disnakermuba.go.id. E-Mail: disnakertransmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 110 /KPTS/NAKERTRANS/2025

TENTANG

SK TIM PERUBAHAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2025.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Perubahan tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 296);
13. Peraturan Bupati Musi Bayuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
14. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Kab. Muba Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Memberlakukan Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Semua Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam kputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 12 Maret 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



M MURSALIN, S.E, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700331 200003 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2025

Nomor : 110 /KPTS/NAKERTRANS/2024
Tanggal: 12 Maret 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - b. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - d. Kepala Bidang Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - e. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
 - f. Kepala UPTD UPT Air Balui.
 - g. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 200003 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan upaya seluruh potensi baik Masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tercapainya Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup secara layak serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dalam satu dekade yang lalu telah cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini masih perlu terus ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih dijumpainya Masyarakat yang belum hidup secara layak yang ditunjukkan masih relative tingginya angka pengangguran dan hidup dibawah garis kemiskinan akibat dari keterbatasan lapangan kerja.

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengacu kepada dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan dokumen perencanaan jangka Panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang – Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan unutm rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Penyusunan Perubahan renja berpedoman pada RKPD Perubahan dan hasil pengendalian pelaksanaan Renda PD provinsi dan Kabupaten sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Perubahan Renja tetap harus mengacu pada dokumen induk Renja dan



Renstra yang terkait serta tetap harus selaras dengan Renja yang lebih tinggi yaitu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Renja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Renja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Perubahan RKPD yang disusun secara simultan dengan Renja Perubahan dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang kemudian dibahas bersama dengan DPRD untuk menjadi bahan evaluasi dan landasan penyusunan rancangan APBD Perubahan.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) menjelaskan bahwa perubahan PKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (6) meliputi perubahan beberapa hal yaitu :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKU daerah, IKU OPD, IKD, IKP); dan atau
3. Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka kesesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkan RKPD tahun 2023 dan APBD tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD tahun 2025, yaitu :

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator Pembangunan daerah tahun 2025.
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025.
3. Adanya audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan.

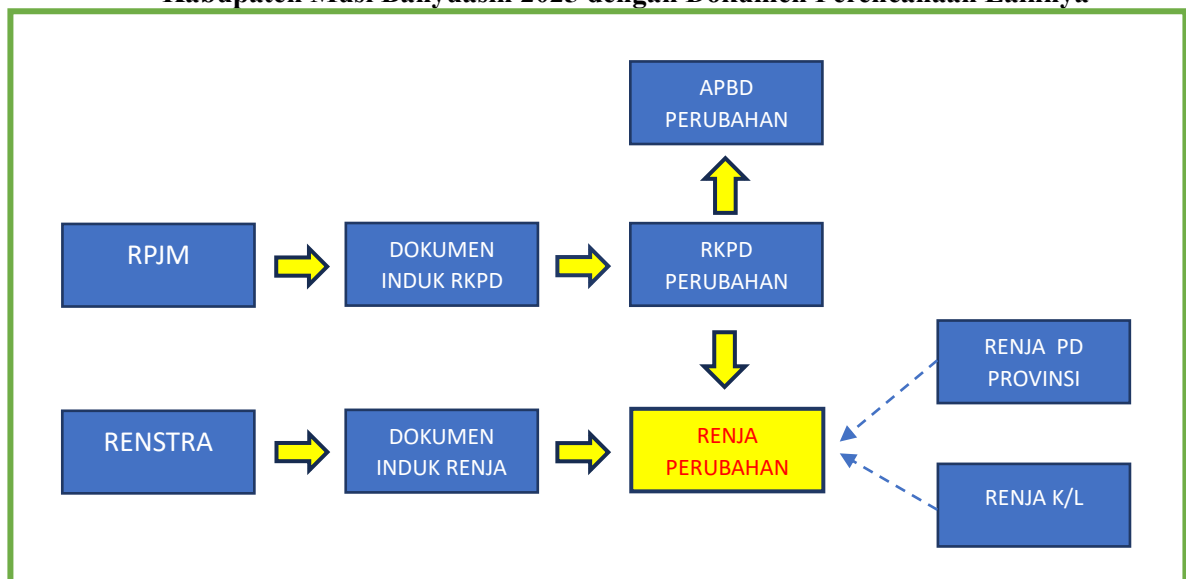


4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4. /069/BAPPEDA/2025 Tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 dalam rangka pedoman penyempurnaan pelaksanaan capaian kinerja tahun 2025.

Gambaran tentang hubungan antara Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
13. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);



22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
30. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin merupakan organisasi perangkat daerah dengan mempedomani kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai rancangan perubahan Rencana Kerja tahun 2025 yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta penyesuaian keadaan eksisting dalam mencapai indikator tujuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 sesuai dengan progress kondisi eksisting.
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Dasar Pertimbangan Perubahan Rehja tahun 2025 adalah adanya kekurangan dana pada operasional belanja rutin yang diantaranya disebabkan adanya perubahan asumsi satuan dan volume belanja serta adanya pertambahan antar jenis belanja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun dalam empat Bab yang tersusun atas ;

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU



2.1.EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Realisasi Anggaran digunakan adalah Rp.12.038.571.698 atau 63,89 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.842.606.612,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALI SASI FISIK	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.558.950.852,00	81,53	7.891.169.597,00	74,78
A	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.880.000,00	100	57.223.000,00	98,86
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.560.000,00	100	38.179.000,00	99,01
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	19.320.000,00	100	19.044.000,00	98,57
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.800.770.812,00	100	5.247.651.907,00	90,46



3	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5.800.770.812,00	100	5.247.651.907,00	90,46
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17.590.000,00	100	17.000.000,00	96,65
4	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	17.590.000,00	100	17.000.000,00	96,65
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.796.940,00	100	102.446.940,00	98,7
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.796.940,00	100	40.796.940,00	100
6	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	63.000.000,00	100	61.650.000,00	97,86
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.051.242,00	100	1.012.532.375,00	98,88
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	19.982.713,00	100	19.055.500,00	95,36
8	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	149.067.173,00	100	145.390.000,00	97,53
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.599.475,00	100	49.599.475,00	100
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.146.381,00	100	134.558.761,00	96,7
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.618.500,00	100	101.769.350,00	99,17
12	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000,00	100	18.696.600,00	97,38
13	Penyediaan Bahan/material	40.000.000,00	100	39.900.000,00	99,75
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.584.000,00	100	10.416.000,00	98,41
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	493.853.000,00	100	493.146.689,00	99,86
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.378.080,00	100	63.450.000,00	94,17
16	Pengadaan Mebel	67.378.080,00	100	63.450.000,00	94,17
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.509.768,00	100	925.737.538,00	90,98
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	288.458.568,00	100	205.537.538,00	71,25
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.051.200,00	100	720.200.000,00	98,79
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.169.974.010,00	23,93	465.127.837,00	21,43
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan	79.630.000,00	100	76.272.805,00	95,78



	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2.063.404.010,00	20	362.084.000,00	17,55
20	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	26.940.000,00	100	26.771.032,00	99,37
I	Peningkatan Pelayanan Blud	300.000.000,00	0	0	0
21	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	300.000.000,00	0	0	0
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	424.469.100,00	100	359.136.700,00	84,61
A	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (rtk)	424.469.100,00	100	359.136.700,00	84,61
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	424.469.100,00	100	359.136.700,00	84,61
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.841.901.000,00	82,54	2.520.754.279,00	43,15
A	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	5.841.901.000,00	82,54	2.520.754.279,00	43,15
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	5.667.732.000,00	82	2.360.237.084,00	41,64
2	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	174.169.000,00	100	160.517.195,00	92,16
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	880.581.660,00	100	408.500.677,00	46,39
A	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/kota	214.363.960,00	100	1.875.000,00	0,87
1	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	214.363.960,00	100	1.875.000,00	0,87
B	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	581.754.100,00	100	371.615.847,00	63,88
2	Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	82.920.000,00	100	64.782.700,00	78,13
3	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	346.180.000,00	100	273.606.237,00	79,04
4	Job Fair/bursa Kerja	152.654.100,00	100	33.226.910,00	21,77
C	Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/kota	84.463.600,00	100	35.009.830,00	41,45



5	Peningkatan Pelindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (pmi)/pekerja Migran Indonesia (pmi)	84.463.600,00	100	35.009.830,00	41,45
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.026.608.000,00	100	752.043.785,00	73,26
A	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	527.664.000,00	100	475.539.064,00	90,12
1	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	527.664.000,00	100	475.539.064,00	90,12
B	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/kota	498.944.000,00	100	276.504.721,00	55,42
2	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	212.531.000,00	100	99.398.300,00	46,77
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	105.892.000,00	100	55.834.621,00	52,73
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	180.521.000,00	100	121.271.800,00	67,18
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	110.096.000,00	100	106.866.660,00	97,07
1	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	110.096.000,00	100	106.866.660,00	97,07
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	110.096.000,00	100	106.866.660,00	97,07
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.842.606.612,00	84,23	12.038.571.698,00	63,89



Berdasarkan capaian kinerja keuangan dan fisik kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 untuk realisasi keuangan sebesar 63,89%, sedangkan capaian fisik mencapai 84,23% pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 6 Program 17 Kegiatan:

- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota rencana target fisik 81,53% dan keuangan 74,78% anggaran Rp. 10.558.950.852 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 7.891.169.597 atau sebesar 74,78 % capaian fisik keuangan 81,53%.
 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja rencana target fisik 100% dan keuangan 84,61% dengan anggaran Rp. 424.469.100 dan realisasi Rp. 359.136.700.
 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja rencana target capaian fisik 82,54% dan keuangan sebesar 43,15% dengan anggaran Rp. 5.841.901.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 2.520.754.279 atau sebesar 43,15%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan tidak terealisasinya pencairan anggaran belanja pelatihan sehingga dibayar pada tahun selanjutnya.
 4. Program Penempatan Tenaga Kerja rencana target capaian fisik 100% dan keuangan sebesar 408.500.677% dengan anggaran Rp. 880.581.660 atau sebesar 46,39% realisasi endahnya capaian realisasi keuangan disebabkan adanya efisiensi anggaran/ penundaan belanja.
 5. Program Hubungan Industrial rencana target capaian fisik 100% dan keuangan sebesar 73,26% dengan anggaran Rp. 1.026.608.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 752.043.785.
 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi rencana target capaian fisik 100% dan keuangan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 110.096.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 106.866.660.
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapai rencana target disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran/penundaan pembayaran pengadaan, sehingga mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan :
 - Peningkatan capaian kinerja yang telah ditetapkan
 - Fokus perencanaan penganggaran pada kegiatan penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.



- Melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan belanja perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.

TABEL 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

kode			Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sangat Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Sanga Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	100%	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 orang	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	100%	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	100%	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Palet Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	100%	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 Orang	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	100%

kode			Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2 Dokumen	100%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Dokumen	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan 30 Unit	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan 30 Unit	-	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan 30 Unit	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan 30 Unit	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 6 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 6 Laporan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit	100%
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit	100%
			Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunannya Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang dipelihara / Direhabilitasi 30 Unit	100%
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen	100%
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	25,20%	-	24,1	47,46	196.92%	25,20%	n/a	50%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana	80%	-	50	15	30%	80%	n/a	100%
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1000	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 300	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 967 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 967 orang	100%	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200 orang	100%
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80%	76,29	42,60%	47,78%	112,16	45,80%	n/a	60%
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Unit layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas uang mendapai Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	30 orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 orang	50 orang	200 orang

[illegible]

kode			Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan sd Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	49%	22%	22%	22%	100%	49%	n.a	n.a
			Pengembangan Satuan dan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pengembangan Satuan dan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n.a	n.a
			Penguatan Infruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Permukiman	1 Permukiman	1 Permukiman	1 Permukiman	100%	1 Permukiman	n.a	n.a

SEKAYU, 23 JUNI 2025



KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KEBUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MURSALIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197003312000031001



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kesempatan Kerja

Tabel 2.3
Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Dan Meningkatkan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Tahun 2024

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana 2024	Realiasi	% Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,65	2,13	141,64
2.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	53	58,22	109,85
3.	Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	43,50	68,04	156,41
4.	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	25,2	21,94	87,06
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	80	25	31,25
6.	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Tahun	%	6,5	7,8	80
7.	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	49	61,1	124,6

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan jumlah penduduk menganggur di suatu wilayah dimana berdasarkan konsep seseorang dikatakan menganggur apabila memenuhi kondisi sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dirumuskan sebagai berikut :



$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \cdot 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 sebesar 2,13 % yang artinya masih terdapat sebanyak 2,13% masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin yang berstatus pengangguran dari jumlah Angkatan Kerja. Dimana perbandingan ini sebanyak 7.032 orang pengangguran dengan jumlah angkatan kerja sebesar 142.297 (sumber BPS.Kab. Muba,2024). Meskipun demikian, angka ini menunjukkan masih dibawah target 3,65 % persentasi capaian sebesar 141,64% kategori sangat baik.

2. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan disuatu daerah. Aspek yang diukur dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terdiri dari 9 Indikator utama yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Serta jaminan social tenaga kerja. Indeks pembangunan ketenagakerjaan diperoleh dari penjumlahan 9 indikator utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IPK = I.IPK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I.HI + I.KLK + I. UPAH + I.JSTK$$

Berdasarkan hasil pengukuran, status pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 masih berada di tingkat menengah bawah, yakni berada diantara angka 50,00 – 65,99. Nilai Indeks indikator utama dikategorikan baik jika bernilai lebih dari sama dengan 5 dan dikategorikan belum baik jika nilainya kurang dari 5. Dari 9 (sembilan)

indikator utama yang diukur, 7 (tujuh) diantaranya masuk kategori baik, sedangkan 2 (dua) indikator utama lainnya masuk kategori belum baik. Indikator utama yang masuk kategori baik adalah perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas



tenaga kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Hasil pengukuran IPK Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator utama yang memiliki indeks tertinggi adalah kesempatan kerja sebesar 10,01. Sedangkan indikator utama yang memiliki indeks terendah adalah hubungan industrial dengan nilai indeks 2,50. Dari 9 (sembilan) indikator utama, 6 (enam) diantaranya mengalami peningkatan nilai indeks, 2 (dua) indikator utama mengalami penurunan nilai indeks, dan 1 (satu) indikator utama tidak mengalami perubahan.

3. Persentase Pekerja yang ditempatkan

Persentase pekerja yang ditempatkan dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pekerja yang ditempatkan} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Persentase Tenaga Kerja terlatih tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 21,94 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi sebanyak 149 orang terdiri dari pelatihan dan sertifikasi Migas dengan jumlah pencari kerja sebanyak 679 orang. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 25,2%. Persentasi capaian sebesar 87,06 %.

4. Persentase Tenaga Kerja Terlatih

Persentase Tenaga Kerja terlatih adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Terlatih} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$$

Persentase Tenaga Kerja terlatih tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 21,94 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi sebanyak 149 orang terdiri dari pelatihan dan sertifikasi Migas dengan jumlah pencari kerja sebanyak 679 orang. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 25,2%. Persentasi capaian sebesar 87,06 %.



5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja didapat dari perbandingan antara jumlah sarana yang dibangun/diperbaiki di bagi dengan jumlah total sarana tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja}}{\frac{\text{Jumlah Sarana yang dibangun/diperbaiki}}{\text{Jumlah Total Sarana}}} \times 100$$

Pada tahun 2024 capaian persentase peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja sebanyak 1 satu unit dari target 9 sarana yang ada, target yang diharapkan pada tahun 2024 sebesar 80% tetapi hanya terealisasi sebesar 25% dengan capaian sebesar 31,25%. Pada anggaran Perubahan sudah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi asrama putra putri Balai Latihan Kerja (BLK) tetapi tidak dapat terlaksana disebabkan adanya efesiensi untuk belanja bangunan Fisik sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

6. Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun

Angka sengketa Pengusaha Pekerja tahun perbandingan antara jumlah angka sengketa dalam satu tahun dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Angka Sengketa Pengusahaan Tahun}}{\frac{\text{Jumlah Perselisihan dalam tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan}}} \times 100\%$$

Angka sengketa pengusaha pekerja tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 7,8 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah perselisihan yang terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 33 Kasus terdiri dari 26 phk, 7 perselisihan hak dengan jumlah perusahaan 421 perusahaan. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 6,5 %. Persentasi capaian sebesar 80%.

7. Presentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan

Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan



dengan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$
---	--

Persentase pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 61,1 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah tenaga kerja yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 39.362 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 64.422 orang Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 49%. Persentase capaian sebesar 124,6 %.

b) Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.4

Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rencana 2024	Realiasi	% Capaian
1.	Persentase Terbina Warga Transmigrasi	%	100	100	100
2.	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	40	40	100
3	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	%	61	61	100

Untuk capaian indikator persentase terbina transmigrasi capaian sebesar 100% dimana jumlah penempatan transmigrasi pada tahun 2015 dan 2016 terdiri dari UPT Air Balui sebanyak 185 KK, UPT Jud Nganti semua dilakukan pembinaan transmigrasi sebanyak 185 KK jadi capaian sebesar 100%.



c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 2.5.

**Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rencana 2024	Realiasi	% Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	100	100
2.	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	%	100	100	100
3.	Persentase Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat Waktu	%	100	100	100
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	%	100	100	100

d) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 2.4

**Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rencana 2024	Realiasi	% Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	100	100
2.	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	%	100	100	100
3.	Persentase Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat Waktu	%	100	100	100
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	%	100	100	100



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan sasaran yang telah dicapai dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun, maka jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dikelompokkan dalam 2 (dua) urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan hasil yang dicapai dari Program yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

- a. **Pelayanan dalam rangka peningkatan pelatihan keterampilan dan produktivitas bagi calon tenaga kerja, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan telah dilaksanakan program-program yang mengarah kepada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.**

Sesuai dengan program kegiatan pada Renstra 2023-2026 Bidang Ketenagakerjaan hasil yang dicapai dari Program yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel-tabel Berikut :

- a. **Pelayanan dalam rangka peningkatan pelatihan Keterampilan dan Produktivitas bagi calon Tenaga Kerja.**

Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan telah dilaksanakan program-program yang mengarah kepada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis Kompetensi.

Tabel 2.8
Data Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sd 2024

NO	Pelatihan	Jumlah Peserta				Jumah
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Pelatihan Welder	20	30	23	20	93
2	Pelatihan Rigger	20	10	53	25	108
3	Pelatihan Scaffolding	20	10	68	25	123



4	Pelatihan Operator Forklift	-	-	23	-	23
5	Pelatihan Operator Lantai Perawatan Sumur	-	-	51	25	76
6	Pelatihan Teknisi Sistem Utilitas	-	-	33	-	33
7	Pelatihan K3 Migas	-	-	3	20	23
8	Pelatihan Juru Pipa / Pipefitter	13	25	-	-	38
9	Pelatihan Electrical	-	9	-	-	9
10	Pelatihan Sertifikasi Pemanen Buah Sawit	-	-	20	80	100
11	Perakitan computer	16	-	-	-	16
12	Pelatihan Kecantikan Rambut	16	-	32	-	48
13	Pelatihan Computer Asistant Operator (COA)	-	-	16	-	16
14	Pelatihan Penerangan	16	-	-	-	16
15	Pelatihan Multimedia	16	-	-	-	16
16	Pelatihan Operator Komputer	-	-	-	32	32
17	Pelatihan Tata Rias	-	-	-	16	16
18	Pelatihan Instrumentasi Level 1	-	-	3	-	3
19	Pelatihan Sertifikasi Pertukangan	-	-	100	-	100
	Jumlah (orang)	137	84	425	243	889

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktif

b. Pelayanan dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Bagi Calon Tenaga Kerja

Pelayanan penempatan dimulai dari Ketersediaan data Informasi Pasar Kerja yang meliputi jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Musi Banyuasin lowongan yang ada serta penempatannya. Dari Data tersebut dapat mendapatkan pekerjaan formal. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bermuara pada perluasan



kesempatan kerja. Kegiatan yang telah dianggarkan selama 2017-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja

Penyebaran informasi ini dimaksud agar para pencari kerja mengetahui segala sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja dan mengetahui informasi tentang dunia kerja. Misalnya membuat lamaran kerja, kita menghadapi wawancara, informasi pendaftaran pencari kerja Kabupaten, dan lain-lain. Beberapa data yang berkaitan dengan keadaan pencari kerja dan penempatannya disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel.2.9
Pencari Kerja Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2024

No	PD Kabupaten	Tahun Penyelenggaraan								ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin	1.263	990	885	494	1980	928	967	679	

Sumber : Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Keadaan Pencari Kerja pada tahun 2017 s.d 2024 cukup Fluktuatif pada.

Tabel.2.10
Pencari Kerja di Tempatkan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2024

No	PD Kabupaten	Tahun Penyelenggaraan								Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin	368	320	146	191	805	708	462	462	

Sumber : Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

B. Pelayanan dalam Rangka Pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, meliputi :

1. Penyelesaian Kasus

Kasus yang berhasil diselesaikan selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun yang masuk dan kasus yang diselesaikan sebanyak :

Tabel.2.12
Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2017-2024



Tahun	Jumlah Kasus yang tercatat	Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
2017	27 Kasus	8 Kasus
2018	28 Kasus	2 Kasus
2019	24 Kasus	8 Kasus
2020	50 Kasus	10 Kasus
2021	38 Kasus	4 Kasus
2022	24 Kasus	6 Kasus
2023	26 Kasus	8 Kasus
2024	33 Kasus	5 Kasus

Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten

Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perbandingan antara UMK dengan KHL rata-rata diatas 90% yang artinya UMK sudah mendekati Kebutuhan Hidup Layak. Perkembangan UMK dan KHL tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.13
Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2024

Tahun	UMK (Rp)	KHL (Rp)	UMK / KHL (%)
2017	2.469.550	2.283.914	108,1 %
2018	2.684.650	2.447.619	110 %
2019	2.900.227	2.465.310	117,64%
2020	3.147.036	2.957.700	106,40%
2021	3.251.832	3.081.059	105,54%
2022	3.251.832		
2023	3.502.873		
2024	3.547.745		

Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

2. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Dalam rangka pembangunan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui



Program- program Kegiatan sesuai dengan rencana lima tahun (Renstra). Adapun capaian Kinerja dari Program Kegiatan tersebut menunjukkan tingkat Keberhasilan yang cukup Signifikan. Argumentasi ini didasarkan hasil penilaian kinerja melalui LAKIP kurun waktu 2012-2016 tersebut merujukkan capaian Kinerja 100% terhadap program Ketransmigrasian, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.14
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT yang Dibina	%
2017	1 UPT	1 UPT	100
2018	1 UPT	1 UPT	100
2019	1 UPT	1 UPT	100
2020	1 UPT	1 UPT	100
2021	1 UPT	1 UPT	100

Sumber : Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi

Tabel.2.15
Jumlah Transmigran yang terbina Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah KK yang dibina	Keterangan
2017	185 KK	1 UPT
2018	185 KK	1 UPT
2019	185 KK	1 UPT
2020	185 KK	1 UPT
2021	185 KK	1 UPT

a. Isu Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan

Kesetaraan tempat kerja tidak terdiri dari mentransfer hak istimewa kepada perempuan dan merampas laki-laki dari kelompok tradisional bebas, hak eksklusif, tetapi mengambil semua bentuk diskriminasi daripada memindahkan dominasi dari laki-laki ke perempuan. Ini dianggap sebagai proses penghilangan dominasi. Kesetaraan di tempat kerja menganggap perempuan memenuhi syarat sebagai laki-laki (Astuti, 2018). Kesetaraan tidak



berarti bahwa perempuan berusaha untuk menaikkan level promosi mereka, tetapi tidak memaksa mereka untuk melakukan promosi yang tidak pantas.

Kesetaraan tempat kerja untuk organisasi harus mengharuskan untuk memiliki tenaga kerja yang lebih mewakili campuran seimbang baik gender dan citra adil dari komunitas yang mereka layani karena masuk akal bisnis yang baik (Russell & Eby, 1993). Ini juga berarti bahwa siapa pun yang gagal mendapatkan pekerjaan mendapat hukuman yang sama dengan orang lain. Dalam bentuk apapun, organisasi tidak dapat menerima sistem insentif yang didasarkan pada jenis kelamin karyawan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dalam kesetaraan gender di tempat kerja yaitu antara lain: Stereotip adalah sekumpulan atribut yang dimiliki oleh suatu kelompok, yang diyakini mencirikan anggotanya hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tersebut. Dalam kasus stereotip seksual, atribut melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka. Sifat dan karakteristik yang terkait dengan pria dan wanita berbeda, tetapi mereka juga memiliki nilai yang berbeda. Meskipun diyakini bahwa setiap orang memiliki sifat yang diinginkan, dan sebagian besar menyatakan bahwa sifat laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan dan minoritas. Perempuan cenderung menderita stigma anggota asing dari organisasi sebagai akibat dari perlakuan istimewa terhadap kelompok dominan, dan juga menderita ideologi bahwa perempuan tidak dipekerjakan berdasarkan kualifikasi mereka tetapi diperkirakan dipekerjakan untuk jenis kelamin atau ras mereka (Aslichati, 2011). Meskipun berhasil, para perempuan ini tidak diperlakukan sebagai teladan dan mentor yang dapat diandalkan bagi perempuan lain karena mereka tampaknya memperoleh kesuksesan dengan mengadopsi gaya kerja dan mencerminkan ciri-ciri kelompok dominan, yaitu laki-laki. Perempuan dapat memiliki pengalaman kerja sendiri berdasarkan identitas dan karakteristik pekerjaannya. Ini juga mengakui bagaimana pengalamannya dibentuk oleh proses persepsi dan interpretasi interaktif yang menghubungkannya dengan lingkungannya.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kondisi Ketenagakerjaan Kab. Musi Banyuasin berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	208.735	120.874	329.609
	Bekerja	205.428	117.149	322.577
	Pengangguran Terbuka	3.307	3.725	7.032
2.	Bukan Angkatan Kerja	33.864	108.433	142.297
	Sekolah	15.226	19.689	34.915
	Mengurus Rumah Tangga	8.312	84.589	92.901
	Lainnya	10.326	4.155	14.481
	Jumlah / Total	242.599	229.307	471.906
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86,04	52,71	69,85
	Tingkat Pengangguran	1,58	3,08	2,13

Sumber data : BPS Kab. Muba Tahun 2024

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja sebanyak 117.149. sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.12
Jumlah Tenaga kerja di Perusahaan Kab. Musi Banyuasin berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	52.210	9.950	62.160

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 93, [Kepmenaker dan Transmigrasi No. 224 Tahun 2003](#) tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Buruh Perempuan yang Lembur, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi:

1. Perlindungan jam kerja
2. Perlindungan dalam masa haid
3. Perlindungan selama cuti hamil



4. Pemberian lokasi menyusui
5. Pengakuan kompetensi kerja
6. Larangan melakukan PKH terhadap pekerja perempuan
7. Hak atas pemeriksaan kesehatan, kehamilan, dan biaya persalinan.

Adapun perlindungan hukum lainnya yang diterima oleh pekerja perempuan yaitu hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki, hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, hak untuk menyusui, hingga hak cuti keguguran. Hak pekerja perempuan juga diatur dalam beberapa konvensi internasional, di antaranya Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 100 dan UU No. 80 Tahun 1957 tentang Upah yang Setara dan Pengupahan Bagi Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. Dalam konvensi disebutkan, pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha dengan buruh berhubungan dengan pekerjaan buruh.

2. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

Dalam rangka pembangunan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui Program-program Kegiatan sesuai dengan rencana lima tahun (Renstra). Adapun capaian kinerja dari Program kegiatan tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan. Argumentasi ini didasarkan penilaian kinerja melalui LAKIP kurun waktu 2022-2026 tersebut merujukkan capaian kinerja 100% terhadap program ketransmigrasian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah UPT yang ada	Jumlah UPT yang dibina	%
1	2017	1 UPT	1 UPT	100
2	2018	1 UPT	1 UPT	100
3	2019	1 UPT	1 UPT	100
4	2020	1 UPT	1 UPT	100
5	2021	1 UPT	1 UPT	100



Sumber : Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi

Tabel 2.14
Jumlah Transmigran yang terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah KK yang dibina	Keterangan
1	2017	185 KK	1 UPT
2	2018	185 KK	1 UPT
3	2019	185 KK	1 UPT
4	2020	185 KK	1 UPT
5	2021	185 KK	1 UPT
6	2022	185 KK	1 UPT

Sumber : Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.1. Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah

Kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula dan belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Rendahnya kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang ujung-ujungnya menyebabkan proses produksi yang tidak efisien. Hal ini bisa dilihat beberapa produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk luar terutama barang-barang yang dihasilkan Negara-negara maju. Bukan karena sedikitnya modal yang disediakan dalam proses produksi justru sebaliknya biaya produksi tinggi tetapi hasil produksi rendah.

Tabel 2.15

Data Penduduk yang bekerja di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang bekerja	283.386	290.744	317.686	318.096	331.037	328.483	322.577
2	Pengangguran Terbuka	9.643	12.573	15.986	13.230	15.241	8.708	7.032

1.2. Belum Maksimal Keberadaan Balai Latihan Kerja

UPT Balai Latihan Kerja (BLK) memainkan peran signifikan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan siap pakai. Berbagai program dan pelatihan diadakan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) dengan harapan dapat membantu para pencari kerja agar dapat terserap di pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha). Namun kondisi yang sekarang dihadapi oleh UPT Balai Latihan Kerja adalah :

- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelatihan keterampilan, lulusan BLK belum seluruhnya dapat ditempatkan. Lulusan dengan kualitas rendah ini disebabkan fasilitas pelatihan yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang berimbas pada pelaksanaan program. Perlu peningkatan sarana dan prasarana latihan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Terbatasnya tenaga fungsional instruktur dan kompetensi instruktur masih rendah (perlunya *upgrading* sesuai dengan kebutuhan pasar kerja).
- Perlu optimalisasi pilihan jurusan pelatihan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan permintaan pasar.

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Muara dari permasalahan ketenagakerjaan salah satunya adalah semakin tinggi tingkat pengangguran. Apalagi tingginya tingkat pengangguran ini semakin diperparah dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). PHK yang dilakukan untuk efisiensi perusahaan. Pengangguran ini akan berakibat luas dalam prospek pembangunan ekonomi Negara. Banyaknya jumlah pengangguran merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi Negara dan pemicu terganggunya stabilitas sosial dan politik.

Tabel 2.16

Data Pengangguran di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengangguran (orang)	9.643	12.573	15.986	13.230	15.241	8.708	7.032



Dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pengangguran paling tinggi pada tahun 2020 dan capaian tingkat pengangguran lebih rendah tahun 2024. Tetapi tingkat pengangguran ini juga menjadi permasalahan utama ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan penempatan tenaga kerja.

2.2. Jumlah Angkatan Kerja yang besar

Besarnya angkatan kerja yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tidak mampu diserap semua oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini merupakan pokok penyebab terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Kondisi angkatan kerja dapat digambar sebagai berikut :

Tabel 2.17

Angkatan Kerja di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,38	66,35	70,61	69,18	71,12	72,63	69,85
2	Angka Angkatan Kerja (Orang)	293.029	303.317	333.854	331.326	346.278	337.191	329.609

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angkatan kerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja karena kesempatan kerja yang tidak sebanding atau lebih kecil dari jumlah angkatan kerja yang ada.

2.3. Ketidak seimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja)

Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang urusan ketenagakerjaan di satu pihak terdapat kelebihan persediaan, dilain pihak terdapat kelebihan kebutuhan yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan berproduksi pencari kerja. Kelebihan persediaan tenaga kerja biasanya terjadi di pasar kerja dengan mutu modal manusia yang rendah. Tenaga Kerja yang memiliki pendidikan dan produktivitas rendah



tidak dapat mengisi/ pekerjaan yang memiliki pendidikan dan produktivitas tinggi.

Tabel 2.18
Data Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang ditempatkan
di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang terdaftar	990	885	494	1980	928	967	679
2	Pencari Kerja ditempatkan	320	146	191	805	708	462	462

Ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin sangat rendah bahwa penempatan tenaga kerja sudah diatas 50% dari total pencari kerja, tetapi pada tahun 2024 penempatan lebih menurun dibandingkan tahun 2023 tetapi pencari kerja menurun juga sehingga capaian penempatan lebih dari 50%.

3. Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Masih tingginya Angka perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan penyebab tingginya angka perselisihan hubungan industrial diperusahaan dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- Kurang patuhnya manajemen perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan
- Ketidah pahamannya pekerja terhadap aturan ketenagakerjaan
- Tidak sinkronnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap tujuan dibentuknya serikat pekerja
- Belum dianggap pentingnya pembentukan dan peranan LKS Bipartit di Tingkat Perusahaan
- Kurangnya Kesadaran Pekerja untuk memanfaatkan LKS Bipartit di Tingkat Perusahaan
- Kurangnya Kesadaran pekerja untuk memanfaatkan LKS Bipartit dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Permasalahan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah :



- Lahan usaha Transmigrasi yang tumpah tindih dengan perusahaan Perkebunan (Investor).
- Terisolirnya daerah transmigrasi dikarenakan sarana infrastruktur yang kurang memadai.
- Lahan transmigrasi masih kurang.
- Masih terdapat beberapa lokasi termasuk lokasi dalam HPK yang perlu dilepaskan oleh Menteri Kehutanan.
- Masih terdapat kekurangan sertifikat lahan transmigrasi
- Beberapa wilayah unit permukiman transmigrasi termasuk dataran rendah sehingga sering terkena bencana banjir.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 pada akhir Renstra Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		TW II		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	5	6	7	9	9	11	12	13
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan		Indeks	55	52	53	54	52,95	55,97	53	54	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		%	4,24	3,8	3,65	3,5	4,40	2,58	3,65	3,5	
3.	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Tahun		%	5,1	7,8	6,5	5,4	5,53	6,03	6,5	5,4	
4.	Persentase Terbinanya Transmigrasi		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Dokumen Rencana Tenaga Kerja		Dok	n/a	1	1	1	n/a	1	1	1	
6.	Persentase Tenaga Kerja Terlatih		%	n/a	24,1	25,2	26,27	n/a	47,46	25,2	26,27	
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja		%	n/a	50	80	90	n/a	15	80	90	
8.	Persentase Pekerja yang ditempatkan		%	58	42,60	43,50	45,80	76,29	47,78	43,50	45,80	
9.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun		%	5,1	7,8	6,5	5,4	5,53	6,03	6,5	5,4	
10.	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		%	n/a	41	49	56	n/a	55,87	49	56	
11.	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi		%	n/a	22	40	70	n/a	22	40	70	



12.	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi		%	n/a	49	61	79	n/a	49	61	79	
-----	--	--	---	-----	----	----	----	-----	----	----	----	--

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Rancangan Awal RPD Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Rancangan Awal RKPD Perubahan dan Analisis Kebutuhan

Pada rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin usulan Pagu Anggaran Rp. 17.387.378.681 berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan dan Pagu Indikatif menjadi Rp. 15.600.324.095.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran Rp. 7.902.872.506 berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan dan Pagu Indikatif menjadi Rp. 9.690.463.634.
- Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp.418.587.050 berdasarkan analisis Kebutuhan dan pagu indikatif menjadi Rp.364.317.050.
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 7.044.780.600 berdasarkan analisis kebutuhan dan pagu indikatif menjadi Rp. 4.506.892.000.
- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 978.035.525 berdasarkan analisis kebutuhan dan pagu indikatif menjadi Rp. 511.585.825.
- Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp. 978.035.525 berdasarkan analisis kebutuhan dan pagu indikatif menjadi Rp. 511.585.825.
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp.300.000.000 berdasarkan analisis kebutuhan dan pagu indikatif menjadi Rp. 156.038.586.

Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini review usulan kegiatan terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025 terhadap analisis Kebutuhan.

TABEL TC 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	RANCANGAN AWAL / RPKD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				17.387.378.681,00		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				15.600.324.095,00
	URUSAN PEMERINTAHAN				17.087.378.681,00		URUSAN PEMERINTAHAN				15.444.285.509,00
	URUSAN PEMERINTAHAN				17.087.378.681,00		URUSAN PEMERINTAHAN				15.444.285.509,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	7.902.872.506,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	9.690.463.634,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	122.299.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	122.299.000,00
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.360.000,00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.392.000,00
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.320.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.364.000,00
0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	40.619.000,00		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	20.029.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.833.556.998,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.607.708.665,00
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.833.556.998,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	8.083.587.945,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	17.590.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	17.590.000,00
0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17.590.000,00		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17.590.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	149.519.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	149.519.000,00
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.164.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00

NO	RANCANGAN AWAL / RKPД					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	112.355.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	56.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	695.883.940,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	695.883.940,00
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.963.364,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.963.364,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	132.724.490,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	128.022.796,00
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.602.400,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.602.400,00
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.785.356,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.217.778,00
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.764.430,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.741.050,00
0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.308.400,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.268.400,00
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.735.500,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122.410.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	87.104.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	87.104.000,00
0005	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	87.104.000,00		Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	70.772.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	785.206.568,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	729.539.901,00
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.658.568,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.658.568,00
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	534.548.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	417.131.333,00

NO	RANCANGAN AWAL / RKPД					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah	100 %	211.713.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum	100 %	211.713.000,00
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	89.350.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	89.350.000,00
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.873.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.873.000,00
0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	25.490.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	25.490.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	418.587.050,00		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	364.317.050,00
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	418.587.050,00		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	418.587.050,00
0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	418.587.050,00		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	364.317.050,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %	7.044.780.600,00		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %	4.506.892.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %	6.924.818.600,00		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %	4.524.818.600,00
0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	5.766.572.000,00		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	4.506.892.000,00
0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	1.158.246.600,00		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	0,00
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	119.962.000,00		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	119.962.000,00
0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	119.962.000,00		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	0,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80 %	978.035.525,00		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80 %	511.585.825,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 %	257.679.925,00		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 %	257.679.925,00
0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	257.679.925,00		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	152.769.925,00

NO	RANCANGAN AWAL / RKPd					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	630.252.700,00		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	630.252.700,00
0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	51.928.000,00		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	45.642.000,00
0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	273.501.000,00		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	109.323.000,00
0003	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	304.823.700,00		Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	156.422.900,00
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	90.102.900,00		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	90.102.900,00
0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	90.102.900,00		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	47.428.000,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertama Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	5,4 56 % %	743.103.000,00		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertama Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	5,4 56 % %	371.027.000,00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)		-	-	337.940.000,00		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah		-	-	337.940.000,00
0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	337.940.000,00		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	165.655.000,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	405.163.000,00		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	405.163.000,00
0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	228.034.000,00		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	115.694.000,00

NO	RANCANGAN AWAL / RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	177.129.000,00		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	89.678.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN				300.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN				156.038.586,00
	URUSAN PEMERINTAHAN				300.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN				156.038.586,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-	300.000.000,00		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		-	-	156.038.586,00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	300.000.000,00		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	300.000.000,00
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	225.000.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	106.968.100,00
0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	75.000.000,00		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	49.070.486,00
					17.387.378.681,00						15.600.324.095,00

SEKAYU, 23 JUNI 2025



KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MURSALIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197003312000031001



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun anggaran 2025 Usulan Program Kegiatan dan Kegiatan Usulan dari Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin .

Tabel 2.26
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kegiatan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volumen	Catatan
	--- NIHIL ---				



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah maka perlu adanya program/kegiatan yang dapat membantu tercapainya tujuan Kepala Daerah, adapun faktor-faktor yang mendukung menjadi pertimbangan program / kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Transmigrasian.
2. Terciptanya Hubungan Industrial yang kondusif.
3. Tingginya Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan.
4. Kompetensi yang dimiliki Pencari Kerja tidak sesuai dengan pasar kerja
5. Adanya perubahan volume belanja Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon.

Dengan adanya pertimbangan program/kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2025 merumuskan 6 program 7 kegiatan dilihat dalam table 3.2 sebagai beriku

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				17.387.378.681,00	14.705.863.681,00	15.600.324.095,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.087.378.681,00	14.405.863.681,00	15.444.285.509,00			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				17.087.378.681,00	14.405.863.681,00	15.444.285.509,00			
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	7.902.872.506,00	7.621.357.506,00	9.690.463.634,00			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	122.299.000,00	122.299.000,00	122.299.000,00			
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	62.360.000,00	62.360.000,00	50.392.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	19.320.000,00	19.320.000,00	14.364.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	40.619.000,00	40.619.000,00	20.029.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.833.556.998,00	5.607.708.665,00	5.607.708.665,00			
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	89 Orang/bulan	5.833.556.998,00	5.607.708.665,00	8.083.587.945,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah	
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00			
	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	149.519.000,00	149.519.000,00	149.519.000,00			
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	37.164.000,00	37.164.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	112.355.000,00	112.355.000,00	56.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	695.883.940,00	695.883.940,00	695.883.940,00			
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.963.364,00	19.963.364,00	19.963.364,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	132.724.490,00	132.724.490,00	128.022.796,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.602.400,00	39.602.400,00	39.602.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.785.356,00	135.785.356,00	68.217.778,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.764.430,00	85.764.430,00	54.741.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	45.308.400,00	45.308.400,00	25.268.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	196.735.500,00	196.735.500,00	122.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah		
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	87.104.000,00	87.104.000,00	87.104.000,00				
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	87.104.000,00	87.104.000,00	70.772.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah		
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terperuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	785.206.568,00	729.539.901,00	729.539.901,00				
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250.658.568,00	250.658.568,00	250.658.568,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah		
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	534.548.000,00	478.881.333,00	417.131.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)		
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terperuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah	100 %	100 %	211.713.000,00	211.713.000,00	211.713.000,00				
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	89.350.000,00	89.350.000,00	89.350.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah		
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	96.873.000,00	96.873.000,00	96.873.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah		
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	25.490.000,00	25.490.000,00	25.490.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah		
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	418.587.050,00	418.587.050,00	364.317.050,00				
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	100 %	418.587.050,00	418.587.050,00	418.587.050,00				
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	418.587.050,00	418.587.050,00	364.317.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)		
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %	90 %	7.044.780.600,00	4.644.780.600,00	4.506.892.000,00				
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %	100 %	6.924.818.600,00	4.524.818.600,00	4.524.818.600,00				
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	120 Orang	5.766.572.000,00	3.366.572.000,00	4.506.892.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)		
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	4 Unit	1.158.246.600,00	1.158.246.600,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)		
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	119.962.000,00	119.962.000,00	119.962.000,00				
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	119.962.000,00	119.962.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80 %	45,80 %	978.035.525,00	978.035.525,00	511.585.825,00				
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	257.679.925,00	257.679.925,00	257.679.925,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025		
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	50 Orang	257.679.925,00	257.679.925,00	152.769.925,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	100 %	630.252.700,00	630.252.700,00	630.252.700,00			
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	51.928.000,00	51.928.000,00	45.642.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	1000 Orang	273.501.000,00	273.501.000,00	109.323.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	300 Orang	304.823.700,00	304.823.700,00	156.422.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	90.102.900,00	90.102.900,00	90.102.900,00			
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	90.102.900,00	90.102.900,00	47.428.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	5,4 56 % %	5,4 56 % %	743.103.000,00	743.103.000,00	371.027.000,00			
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	337.940.000,00	337.940.000,00	337.940.000,00			
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	5 Laporan	337.940.000,00	337.940.000,00	165.655.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	405.163.000,00	405.163.000,00	405.163.000,00			
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	35 Perkara	228.034.000,00	228.034.000,00	115.694.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	177.129.000,00	177.129.000,00	89.678.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				300.000.000,00	300.000.000,00	156.038.586,00			
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				300.000.000,00	300.000.000,00	156.038.586,00			
6	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	156.038.586,00			
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			
	3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	106.968.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	2 Lokasi	75.000.000,00	75.000.000,00	49.070.486,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
	J U M L A H									17.387.378.681,00	14.705.863.681,00	15.600.324.095,00			



Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin :

TUJUAN :

1. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Mendorong perluasan Kesempatan Kerja serta Mewujudnya Hubungan Kerja yang Harmonis.

Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan target capaian (54)

Program Perencanaan Tenaga Kerja mengalami perubahan anggaran Rp. 418.587.050 menjadi Rp. 364.317.050

2) Tingkat Pengangguran Terbuka Rencana Target (2,10%)

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebelumnya Rp. 7.044.780.600 menjadi Rp. 4.506.892.000

Perubahan kegiatan :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi target sebelumnya dari 200 orang menjadi 120 orang, perubahan anggaran Rp. 5.766.572.000 menjadi Rp.4.506.892.000.
- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Anggaran sebelumnya Rp. 978.035.525 menjadi Rp. 511.585.825.
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan anggaran Rp. 257.679.925 menjadi Rp.152.769.925.
 - Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online anggaran Rp. 51.928.000 menjadi Rp. 45.642.000.
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online anggaran Rp. 273.501.000 menjadi Rp. 109.323.000.
 - Job Fair/Bursa Kerja dengan anggaran Rp. 304.823.700 menjadi Rp. 156.422.900.
 - Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan anggaran Rp. 90.102.900 menjadi Rp. 47.428.000.

Sasaran 2 : Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja**1) Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun dengan target 5,4 %**

- Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp. 743.103.000 menjadi Rp. 371.027.000.
- Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan dengan anggaran Rp. 337.940.000 menjadi Rp. 165.655.000.
- Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota tidak mengalami perubahan anggaran Rp. 228.034.000 menjadi Rp.115.694.000.
- Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartite daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 177.129.000 menjadi Rp. 89.678.000.

2. Meningkatnya Pelayanan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi**Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas**

Persentase Pelayanan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi 100%

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ‘
Persentase Peningkatan Infrastruktur di kawasan Transmigrasi 40%.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp. 225.000.000 menjadi Rp. 106.968.100.
- Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi anggaran sebelumnya 75.000.000 dan menjadi 49.070.486

Pada Renja Perubahan Tahun 2025 sebelumnya pagu anggaran sebesar Rp. 17.387.378.681 menjadi Rp. 15.600.324.095.



BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG MENDAPAT PERHATIAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan bagian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dengan tetap mengacu kepada Dokumen Renstra Disnakertrans Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya rencana pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Catatan Penting yang mendapat perhatian dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 :

1. Dalam rangka pencapaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Perlu dukungan maksimal dalam penyelenggaraan Informasi Lowongan Kerja secara luas, dan peningkatan kompetensi pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Optimalisasi dan Revitalisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagai penyelenggara tempat pelatihan kerja.
3. Optimalisasi Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Penurunan angka sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pembinaan Warga Transmigrasi sebagai Peningkatan Pembinaan Bagi Warga Transmigrasi.
5. Dukungan Anggaran APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan , maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :

1. Prinsip Perencanaan Kegiatan

Mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas, yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan, terukur, ketercapaian, ketersediaan sumber daya dan waktu.

2. Prinsip Administrasi Perencanaan

Yaitu menggunakan *shewhart cycle* yang dikenal direncanakan (do), periksa atau monitor pelaksanaan (check) dan aksi tindak lanjut (action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Kementerian dan lembaga pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah Kabupaten untuk melaksanakan RPD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran perangkat daerah Kabupaten setiap bidang pada setiap misi pembangunan Musi Banyuasin, kelompok PD dibagi 3 yaitu :

1. PD Utama

2. PD Mitra Utama

3. PD pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :

PD Pendukung atas hal yang bersifat umum

PD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas

4. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 aspek yaitu :

- Taat dan sesuai aturan
- Sesuai dengan norma profesionalisme
- Berorientasi pada hasil yang berkualitas

5. Prinsip dukungan kebijakan keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih.

6. Prinsip pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan.



4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dilihat dari capaian indikator Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan triwulan II tahun 2025, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Mendata lowongan Kerja yang ada di perusahaan, dan menempatkan pencari kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, atau permintaan pasar.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Menginventaris pencari kerja yang mendaftar kemudian melakukan pendataan apakah sudah bekerja atau belum.
- Melakukan sinergi dengan Berbagai Pihak dalam rangka pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas .

Demikian Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Sekayu, 23 Juni 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. MURSAJIN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 200003 1 00